PENATAAN-PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

2017

PERDA KAB. BADUNG NO. 3 TAHUN 2017, LD 2017/NO. 3, TLD NO. 3, SETDA

KABUPATEN BADUNG : 23 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ABSTRAK | : | - | bahwa pertumbuhan usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang semakin meningkat, serta guna mewujudkan kepastian usaha dan tertib usaha dan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern perlu ditinjau dan dilakukan pengaturan kembali, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; |
|  |  | - | Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undnag Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undnag nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undnag Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2012; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013. |
|  |  | - | Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:   1. Ketentuan Umum; 2. Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; 3. Jam Kerja; 4. Persyaratan Perdagangan Antara Pemasok dengan Toko Swalayan; 5. Kemitraan; 6. Pengelolaan Pasar Rakyat; 7. Peran Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; 8. Perizinan; 9. Pelaporan; 10. Larangan; 11. Pembinaan dan Pengawasan; 12. Sanksi Administratif; 13. Penyidikan; 14. Ketentuan Pidana; 15. Ketentuan Peralihan; 16. Ketentuan Penutup. |
| CATATAN | : | -  -  - | Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Juli 2017.  Peraturan Daerah ini ditetapkan di Mangupura, tanggal 24 Juli 2017.  Penjelasan : 3 hlm. |